BAB 1

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai lembaga pemerintahan, mulai dari lembaga pemerintahan pusat hingga lembaga-lembaga pemerintah yang berada di daerah seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Tujuan dari keberadaan lembaga pemerintahan tersebut tentu saja untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan aturan maupun proses yang terstruktur. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam pemerintahan terbagi berbagai bidang salah satunya dinas daerah yang mana unsur pelaksana pemerintah daerah, dinas daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi,

pada dinas daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu pemerintah kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Marabahan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.284 km² dan berpenduduk sebanyak 276.066 jiwa (2010). Di kabupaten Barito Kuala terdapat 13 dinas daerah yang setiap instansi pemerintah memiliki ciri khas yang membedakannya dengan instansi pemerintah lainnya, ciri khas ini menjadi identitas bagi mereka dan dinamakan budaya organisasi. Dinas lingkungan hidup Barito Kuala merupakan dinas daerah yang tugasnya antara lain perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup pada wilayah kerjanya sehingga dalam pengelolaan tersebut dibutuhkan budaya kerja, namun dalam kenyataannya budaya kerja masih belum tertulis dengan jelas sehingga para pegawai tidak mudah dalam membangun kesepahaman akan suatu pekerjaan dengan rekan kerjanya. Seperti yang dikemukakan oleh Robbins (2003:305) pengertian budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain, sistem makna bersama ini bila diamati dengan lebih seksama merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh suatu organisasi. Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan mempersepsikan

karakteristik dari suatu budaya organisasi bukan dengan apakah para karyawan menyukai budaya atau tidak.

Menurut Hanif dkk (2012:2), tidak hanya budaya organisasi saja yang menentukan tingkat keberhasilan lembaga pemerintahan, tentunya juga didukung oleh banyaknya peraturan dan ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap kegiatan dan perilaku di dalam lembaga pemerintahan, hal tersebut bisa tercapai jika semua pegawai menjunjung tinggi kedisiplinan. Disiplin kerja pegawai dapat diketahui dalam tingkat kehadirannya dalam bekerja, tidak hadirnya pegawai dapat disebabkan banyak alasan dan alasan tersebut tidak mungkin dihindari. Orang sakit dan masalah keluarga seperti anak sakit memungkinkan mereka tidak masuk kerja, ini biasanya dimasukkan sebagai ketidakhadiran tanpa disengaja. Meskipun demikian ada banyak ketidakhadiran yang dapat dihindari yang disebut ketidakhadiran yang disengaja.

Faktor yang mempengaruhi tegak tidaknya suatu disiplin kerja dalam suatu perusahaan/kantor, yaitu (1) ada tidaknya pengawasan pimpinan, (2) diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin (Darajat, 2015:95). Mengukur ketidakhadiran pengawasan atau pengurangan jumlah ketidakhadiran harus dimulai dari pengawasan terus-menerus dalam suatu unit kerja, pengawasan yang demikian membantu pimpinan untuk mengetahui dengan tepat pegawai yang sering tidak hadir dan bagian atau unit lainnya yang mempunyai jumlah ketidakhadiran yang berlebihan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Disiplin Kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala?
2. Apakah Pengawasan berpengaruh terhadap Disiplin Kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala?
3. Diantara variabel Budaya Organisasi dan Pengawasan manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap Disiplin Kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Disiplin Kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui apakah Pengawasan berpengaruh terhadap Disiplin Kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
3. Untuk mengetahui diantara dua variabel Budaya Organisasi dan Pengawasan manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap Disiplin Kerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini bisa digunakan oleh dinas terkait untuk meningkatkan budaya organisasi, pengawasan kerja yang baik demi tercapainya disiplin kerja pegawai.

b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan budaya organisasi, pengawasan, dan disiplin kerja pegawai.

2. Manfaat Praktis

Secara garis besar penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan langsung tentang budaya organisasi, pengawasan dan disiplin kerja pegawai yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.